

PROFIL
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



DINAS SOSIAL
KOTA SURABAYA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya. dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Profil Perangkat Daerah Responsif Gender sesuai 3 Komponen PUG (Pengarutamaan Gender). Profil ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di tingkat lingkungan Perangkat Daerah mendukung terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender mewujudkan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Se-Kota Surabaya.

Pendekatan responsif gender bukanlah sekadar sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis perempuan dan anak-anak dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang telah kami lakukan dalam menjadikan lingkungan Perangkat Daerah kami lebih ramah terhadap perempuan dan lebih peduli terhadap anak-anak. Kami berharap profil ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan Masyarakat tanpa diskriminasi dan Perangkat Daerah.

Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.


Kepala Dinas Sosial
ANNA FAJRIATIN AP, MM

Pembina Tingkat I

IP. 197611101996012001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| BAB II. PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG | 4 |
| BAB III. PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI PERANGKAT DAERAH | 16 |
| BAB IV. TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER KOTA SURABAYA | 37 |
| BAB V. INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 40 |
| BAB VI. PENUTUP | 42 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kebijakan dan program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam pembangunan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan manfaat yang sama dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Ini berarti mengakui bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1499);

3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota wilayah Model Desa/Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan peduli Anak
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77).
8. Permen PPPA No.2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA.
9. Pembentukan Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya berdasar pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/208/436.1.2/2023.
10. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya.

11. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/ 4 /436.1.2/2024 Tentang Penetapan model Daerah ramah perempuan dan peduli anak Kota Surabaya Tahun 2024 Surabaya.
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya.
13. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Nomor : 100.3.3/06.1/436.7.6/2024 Tahun 2024 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2024
14. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Nomor : 100.3.3/13.1/436.7.6/2024 Tahun 2024 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 100.3.3/06.1/436.7.6/2024 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2024

1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG

Pelaksanaan Perangkat Daerah Responsif Gender Sinergi dengan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender yang mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan layak Anak dari kemenPPPA serta memahami strategi percepatan PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui revitalisasi 3 komponen PUG (Pelembagaan, Penyelenggaraan dan Inovasi).
2. Mewujudkan Perangkat Daerah Responsif Gender sebagai model yang baik (*good practise*) dalam mewujudkan keadilan Gender, Disabilitas dan inklusi sosial GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion) mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah ramah Perempuan dan layak anak tanpa diskriminasi.
3. Melaksanakan evaluasi strategi percepatan PUG di Perangkat Daerah beserta wilayah kerjanya apakah sudah sesuai 3 komponen PUG Tahun 2024.
4. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya Tahun 2024.

BAB II

PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG

2.1 Gambaran Umum

Dinas Sosial Kota Surabaya terbentuk sejak tahun 2001. Awalnya, Dinas Sosial merupakan bagian dari pemerintahan Kota Surabaya yang dikenal dengan Bagian Sosial. Kemudian dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab pada Pemerintah Kota Surabaya dan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai konsekuensi penerimaan kewenangan daerah, maka Pemerintah Kota Surabaya merasa perlu mengatur kembali Organisasi Dinas Kota Surabaya. Untuk tujuan itulah Pemerintah menetapkan Perda Nomor: 3 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya. Dalam Perda tersebut, pemerintah menetapkan pembentukan Dinas-Dinas di Kota Surabaya yang terdiri dari 23 Dinas, termasuk didalamnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan merupakan hasil peleburan dari Bagian Sosial dan dengan Cabang Dinas Sosial yang merupakan Instansi Vertikal Pemerintahan Kota. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang sosial dan pemberdayaan perempuan yang meliputi perencanaan, penyusunan program, penyuluhan, rehabilitasi sosial, penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan perempuan. Lebih lanjut Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya.

Dengan adanya perkembangan Penataan Pemerintah Daerah, dan untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2005, Pemerintah Kota mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya. Peraturan ini mengatur kembali Dinas-Dinas di Kota Surabaya, salah satunya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan yang kemudian menjadikan Dinas Sosial berdiri sendiri.

Saat ini, tugas dan fungsi Dinas Sosial diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya. Dalam menjalankan sebagian kegiatan

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas, Dinas Sosial memiliki beberapa Unit Penunjang Teknis Dinas (UPTD) diantaranya UPTD Kampung Anak Negeri, UPTD Liponsos Keputih, dan UPTD Griya Wreda dan Lingkungan Pondok Sosial Babat Jerawat.

2.2 Visi, Misi dan Motto

a. Visi

Mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026, Kota Surabaya mempunyai visi yaitu “Gotong Royong Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan”.

b. Misi

Sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Dinas Sosial mengampu misi 1 dan misi 2 yaitu:

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas, iklim investasi, penguatan daya saing surabaya sebaga pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya.

c. Motto



Gambar II.1 Motto Dinas Sosial Kota Surabaya

Motto ini menekankan komitmen pelayanan yang tulus dan kehadiran aktif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Dinas Sosial berfokus pada pelayanan yang responsif, penuh empati, dan selalu hadir untuk memberikan solusi bagi berbagai permasalahan sosial di Kota Surabaya.

2.3 Demografi

a. Lokasi dan Batas Wilayah Dinas Sosial Kota Surabaya

Dinas Sosial Kota Surabaya berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim No. 131-133, Surabaya, Jawa Timur, yang berada di kawasan perkotaan strategis di pusat Kota Surabaya. Kantor ini memainkan peran penting dalam mendukung layanan sosial kepada masyarakat dan berada di lokasi yang mudah diakses dari berbagai wilayah kota. Penempatan yang strategis ini memungkinkan Dinas Sosial memberikan pelayanan yang lebih efisien, terutama dalam menangani masalah sosial yang beragam di kota besar seperti Surabaya. Secara geografis, kantor Dinas Sosial Kota Surabaya berada di kawasan perkotaan yang padat dan dinamis, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kecamatan Sukolilo, yang merupakan salah satu kawasan pendidikan utama di Kota Surabaya.
2. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Rungkut, yang merupakan salah satu kawasan industri utama di Surabaya.
3. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kecamatan Gubeng, yang merupakan pusat kegiatan komersial dan bisnis di Kota Surabaya.
4. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Mulyorejo, sebuah wilayah yang berkembang sebagai area perumahan dan komersial, serta beberapa fasilitas kesehatan yang melayani kebutuhan masyarakat setempat.

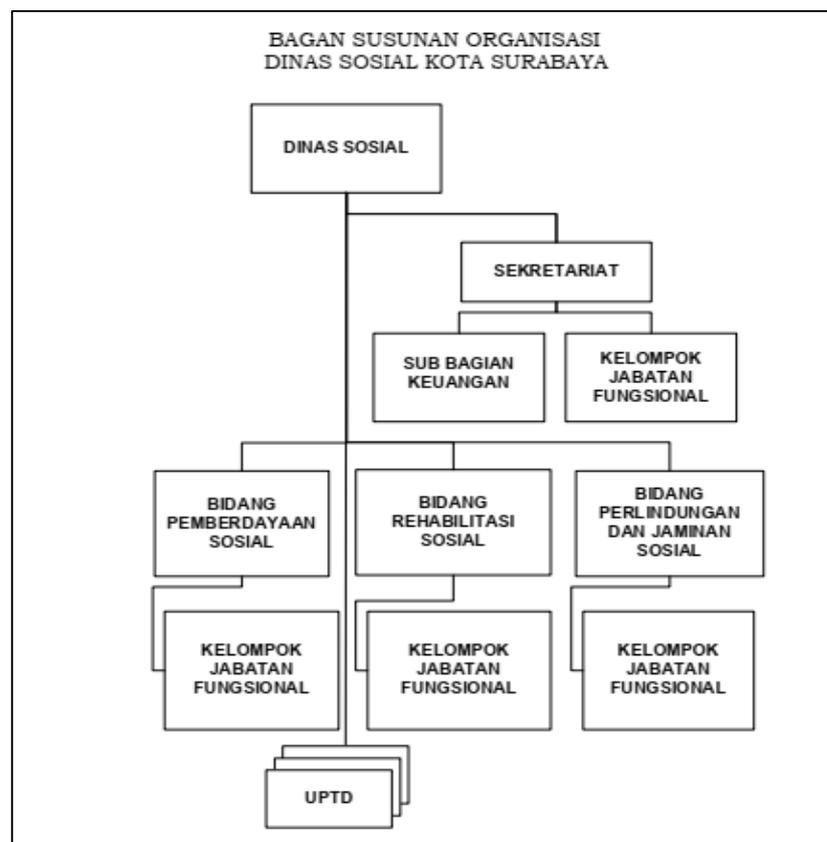
Penempatan geografis kantor Dinas Sosial ini sangat mendukung mobilitas pegawai dinas dan kemudahan akses bagi masyarakat, yang membutuhkan bantuan atau pelayanan dari Dinas Sosial. Selain itu, lingkungan sekitar yang terdiri atas kawasan pendidikan, industri, serta komersial menciptakan dinamika sosial yang beragam, yang menjadi salah satu fokus layanan dari Dinas Sosial Kota Surabaya.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi suatu organisasi dalam menjalankan aktivitasnya, karena struktur tersebut merupakan suatu kerangka yang menunjukkan tentang kedudukan, tugas, fungsi serta menunjukkan hubungan bagian-bagian dalam organisasi dalam kerangka pencapaian tujuan. Struktur organisasi

Dinas Sosial terbagi berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya yakni terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat
3. Bidang Rehabilitasi Sosial
4. Bidang Pemberdayaan Sosial
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
6. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar II.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial

(Sumber: Peraturan Walikota Surabaya No. 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunana Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya)

Dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunana Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya menjelaskan bahwa pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan

teknis penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis Dinas sebenarnya adalah panti-panti sosial yang memberikan pelayanan langsung kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang telah terseleksi. Panti merupakan upaya terakhir apabila masyarakat sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial antara lain:

1. UPTD Liponsos Keputih

Pondok Sosial yang digunakan sebagai tempat penampungan sementara hasil operasi simpatik PMKS jalanan. Alamat UPTD Keputih di Jl. Keputih Tegal No 32 Surabaya.

2. UPTD Liponsos Babat Jerawat

Pondok Sosial yang digunakan sebagai tempat penampungan eks kusta. Alamat UPTD Babat Jerawat di Jl. Keputih Tegal No 32 Surabaya.

3. UPTD Kampung Anak Negeri

Pondok sosial yang digunakan sebagai tempat pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak bermasalah secara sosial di Kota Surabaya. Alamat UPTD: Jl. Keputih Tegal No 32 Surabaya

4. UPTD Pondok Sosial Kalijudan

Pondok sosial tempat pembinaan anak berkebutuhan khusus (tuna grahita) dan mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu. Alamat UPTD Kalijudan di Jl. Villa kalijudan Indah XV kav. 2-4 Surabaya, Telp: 0313818340

5. UPTD Griya Werda

Pondok Sosial yang digunakan sebagai tempat pelayanan kesejahteraan sosial bagi lansia terlantar di Kota Surabaya. Alamat UPTD Griya Werda di Jl. Mendokan Asri Barat, Surabaya.

2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

2.4.1 Kebijakan

Kelembagaan PUG di Pemerintah Kota Surabaya saat ini telah terbentuk melalui Keputusan Walikota Nomor: 188.45/4/436.1.2/2019 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya dan Keputusan Walikota

Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya. Selain itu di level tingkat Kota Surabaya, pada tahun 2023 Pemerintah Kota Surabaya telah membentuk Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya yang dilegalkan dengan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/208/436.1.2/2023 tahun 2023. Forum Puspa Srikandi dibentuk sebagai amanah dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Forum ini merupakan mitra Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan partisipasi publik dalam mensejahterakan, melindungi, serta mengatasi permasalahan perempuan dan anak seperti trafficking, kekerasan, prostitusi, pernikahan usia anak, putus sekolah, eksploitasi dan sebagainya di Kota Surabaya.

Dalam rangka penguatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Dinas Sosial Kota Surabaya, telah dibentuk Focal Point pada OPD yang dilegalkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Nomor 100.3.3/06.1/436.7.6/2024 Tahun 2024 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2024 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Nomor : 100.3.3/13.1/436.7.6/2024 Tahun 2024 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 100.3.3/06.1/436.7.6/2024 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2024 guna mendorong terwujudnya pengembangan kegiatan yang responsif gender di Dinas Sosial Kota Surabaya. Adapun dokumen pendukung terdapat pada link berikut : [SK FOCAL POINT](#)

2.4.2 Sosialisasi PUG

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Dinas Sosial Kota Surabaya, dibutuhkan internalisasi berupa sosialisasi PUG kepada segenap pegawai. Pada tahun 2024, kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada tanggal 2 Mei 2024 dengan pokok bahasan antara lain :

- a. Sosialisasi PUG, kebijakan PUG, Perubahan Focal Point, dll
- b. Pendampingan dan Reviu Penyusunan GAP, GBS, dan TOR Tahun 2024;

Adapun dokumen pendukung terdapat pada link berikut : [Sosialisasi PPRG 2024](#)

2.4.3 SDM Terlatih PUG

1. SDM Perencana dan Penganggaran Terlatih PUG

Dinas Sosial Kota Surabaya telah melatih beberapa SDM yang kompeten dalam PUG, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan teknis, hingga pemantauan dan evaluasi. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan setiap SDM dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan. Adapun dokumen pendukung terdapat pada link berikut : [SDM TERLATIH PPRG](#)

Tabel 1 SDM Terlatih PUG Dinas Sosial Tahun 2024

| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
|----|--------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Ning Resti Sri Hartanti, S.STP | Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian | Terdapat sertifikat pelatihan |
| 2 | Ely Khusnah, SP | Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Sosial Kelembagaan | Terdapat sertifikat pelatihan |
| 3 | Ilma Ameliana Putri, S.IAN | Arsiparis Ahli Pertama | Terdapat sertifikat pelatihan |

Tabel 2 Jumlah Presentase SDM Terlatih

| Jumlah SDM Dinsos | Jumlah SDM Terlatih | % |
|-------------------|---------------------|-------|
| 46 | 3 | 6,52% |

Dari 46 SDM, terdapat 3 orang yang telah terlatih untuk perencanaan dan penganggaran berperspektif gender.

- Jumlah SDM Terlatih: 3
- Persentase Terlatih: 6.52%

2. Focal Point PUG

Sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Nomor : 100.3.3/13.1/436.7.6/2024 Tahun 2024 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 100.3.3/06.1/436.7.6/2024 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2024. Adapun dokumen pendukung terdapat pada link berikut : [SK FOCAL POINT 2024](#)

Tabel 3 Jumlah Focal Point PUG Dinas Sosial Tahun 2024

| Jumlah Tim Focal Point | Keterangan |
|-------------------------------|--|
| 18 | Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Ketua Tim Kerja, dan Kepala UPTD |

2.4.4 Data Terpilah dan sistem publikasinya

Jumlah Sumber Daya Manusia dan data terpilah di Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2024 yaitu:

Tabel 4 Data Terpilah Dinas Sosial

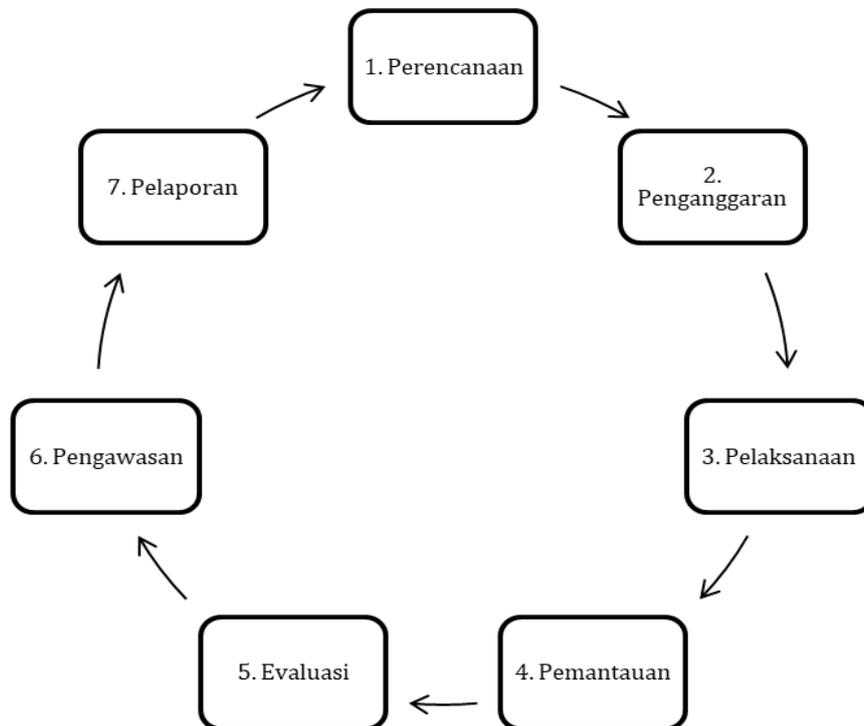
| No | Jenis Ketenagaan | ASN/Non ASN | Jumlah Jenis Kelamin | | Jumlah Total |
|-----------|---|--------------------|-----------------------------|----------|---------------------|
| | | | L | P | |
| 1 | Kepala Dinas | ASN | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Sekretaris Dinas | ASN | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Kepala Sub Bagian Keuangan | ASN | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian | ASN | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial | ASN | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Sosial Kelembagaan | ASN | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Sosial Perorangan | ASN | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial | ASN | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Tuna Sosial dan PMKS lainnya | ASN | 1 | 0 | 1 |

| | | | | | |
|---------------|--|---------|------------|------------|------------|
| 10 | Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas | ASN | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | ASN | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Ketua Tim Kerja Jaminan Sosial | ASN | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Ketua Tim Kerja Perlindungan Sosial | ASN | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Ka. UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih | ASN | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih | ASN | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Ka. UPTD Kampung Anak Negeri | ASN | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kampung Anak Negeri | ASN | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Ka. UPTD Griya Wreda dan Liponsos Kusta Babat Jerawat | ASN | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Griya Wreda dan Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat | ASN | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Staf | ASN | 17 | 11 | 28 |
| 21 | Staf | Non ASN | 315 | 178 | 493 |
| Jumlah | | | 341 | 198 | 539 |

Adapun rincian data terpilah terdapat pada link berikut : [DATA TERPILAH](#)

BAB III
PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI
PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah Responsif Gender (KRG) Sinergi Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut:



3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisi untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses

yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG):

1. Perencanaan yang Responsif Gender

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

a. Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Perencanaan PUG

Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Nomor: 100.3.3/06.1/436.7.6/2024 Tahun 2024 adalah sebuah kebijakan yang mengatur pembentukan Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) di Dinas Sosial Kota Surabaya untuk tahun 2024. Tim ini dibentuk sebagai bagian dari upaya Dinas Sosial untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan atau program, agar tercipta kesetaraan gender di berbagai sektor, khususnya dalam layanan sosial yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Namun, karena terjadi perubahan anggota dalam tim tersebut, diterbitkanlah perubahan SK dengan Nomor: 100.3.3/13.1/436.7.6/2024 Tahun 2024. SK perubahan ini menggantikan atau merevisi keputusan sebelumnya untuk mencatat anggota tim yang baru dan memastikan bahwa formasi tim Focal Point PUG tetap relevan dengan kebutuhan saat ini. Sebagaimana dapat diakses dokumen lengkap terkait perubahan tersebut melalui tautan berikut ini: (link).

b. Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang Responsif Gender

Renstra dan Renja Dinas Sosial Kota Surabaya sebagaimana dapat diakses pada link berikut [RENSTRA DAN RENJA 2024](#)

c. Dokumen Perencanaan penganggaran Responsif Gender (GAP,GBS,TOR)

Program/ kegiatan/ sub kegiatan Dinas Sosial Kota Surabaya yang Responsif Gender pada Tahun 2024 sebanyak 14 sub kegiatan sebagaimana dapat diakses pada link berikut [PPRG DINSOS 2024](#)

d. Hasil Analisis Gender

Hasil analisis gender diwujudkan dalam bentuk dokumen *Gender Analysis Pathway* (GAP), *Gender Budget Statement* (GBS), serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) / *Term of Reference* (TOR). Pada tahun 2024 terdapat 14 sub kegiatan Dinas Sosial Kota Surabaya yang telah disusun GAP, GBS dan TOR. Adapun dokumen tersebut dapat diakses pada link berikut [PPRG DINSOS 2024](#)

e. Alat Analisis Gender

Alat dan Teknik Analisis Gender yang digunakan adalah Model *Gender Analysis Pathway* (GAP). Komponen Utama Analisis Gender Model *Gender Analysis Pathway* (GAP) menggunakan 9 langkah, yaitu :

- Langkah pertama : Memilih kebijakan/ program/ kegiatan
- Langkah ke-2 : Menyajikan data pembuka wawasan terpilah menurut jenis kelamin dan usia, baik kuantitatif maupun kualitatif (dari kelompok sasaran)
- Langkah ke-3 : Mengenal isu kesenjangan gender
- Langkah ke-4 : Menemu kenali isu kesenjangan gender internal
- Langkah ke-5 : Menemu kenali isu kesenjangan gender eksternal
- Langkah ke-6 : Merumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan
- Langkah ke-7 : Menyusun rencana aksi
- Langkah ke-8 : Tetapkan *baseline* (data dasar)
- Langkah ke-9 : Indikator kinerja gender

2. Penganggaran yang Responsif Gender

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan

mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan

- a. Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.
- b. Kebijakan tentang penganggaran PUG didasarkan pada pencapaian Visi dan Misi Kota Surabaya 2021-2026 yang selaras dengan :
 - RPJMD Kota Surabaya 2021-2026
 - Renstra Dinas Sosial Kota Surabaya
 - Renja Dinas Sosial Kota Surabaya
 - Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Nomor : 100.3.3/06.1/436.7.6/2024 Tahun 2024 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2024
 - Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Nomor : 100.3.3/13.1/436.7.6/2024 Tahun 2024 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 100.3.3/06.1/436.7.6/2024 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2024
- c. Kegiatan/Sub Kegiatan Responsif Gender

Anggaran Responsif Gender (GAP, GBS, TOR) di Perangkat Daerah Dinas Sosial, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Anggaran Responsif Gender

| No | Nama Sub Kegiatan | Anggaran |
|----|--|----------------------|
| 1 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Rp. 409.7622.915,- |
| 2 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Rp. 772.931.635,- |
| 3 | Penyediaan Permakanan | Rp. 10.609.927.667,- |

| | | | |
|-----------------------|---|------------|--------------------------|
| 4 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Rp. | 391.915.029,- |
| 5 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Rp. | 8.286.917.328,- |
| 6 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Rp. | 5.132.354.784,- |
| 7 | Pemberian Layanan Rujukan | Rp. | 640.392.326,- |
| 8 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Rp. | 2.820.881.361,- |
| 9 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Rp. | 6.581.943.109,- |
| 10 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 4.017.010.580,- |
| 11 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 576.918.171,- |
| 12 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Rp. | 48.074.447.125,- |
| 13 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Rp. | 7.928.410.824,- |
| 14 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota | Rp. | 1.756.987.458,- |
| TOTAL ANGGARAN | | Rp. | 101.688.660.312,- |

Pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender Dinas Sosial Kota Surabaya terdiri dari 14 (Empat Belas) sub kegiatan yaitu:

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Tujuan : Meningkatkan keterlibatan lembaga dalam kegiatan kemasyarakatan.

Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari – Desember 2024

Pagu : Rp. 409.7622.915,-

Manfaat : Menambah pengetahuan dan wawasan serta timbulnya semangat kerjasama.



Gambar : Kegiatan Tagana Goes To School dan Pertemuan WPKS

2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

- Tujuan : Meningkatkan kualitas kebutuhan dasar
- Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari – Desember 2024
- Pagu : Rp. 772.931.635,-
- Manfaat : Menambah pengetahuan dan wawasan serta timbulnya semangat kerjasama.



Gambar : Akreditasi LKS dan Pengembangan Potensi Karang Taruna

3. Penyediaan Permakanan

- Tujuan : Meningkatkan kualitas kebutuhan dasar
- Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari – Desember 2024
- Pagu : Rp. 10.609.927.667,-
- Manfaat : Mendukung program rehabilitasi dan pemberdayaan penghuni UPTD, di mana asupan makanan yang baik merupakan bagian dari pemulihan dan peningkatan kualitas hidup para penghuni yang

sebagian besar merupakan kelompok marginal atau rentan.



Gambar : Monitoring Penyediaan Bahan Permakanan

4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Tujuan : Mengembalikan fungsi sosial PMKS ke masyarakat sebagai tindak lanjut dari hasil pemberdayaan yang diberikan ke PMKS

Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari – Desember 2024

Pagu : Rp. 391.915.029,-

Manfaat : Adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan akses pengantaran ke daerah asal untuk kembali ke Keluarga.



Gambar : Kegiatan Reunifikasi Keluarga

5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (Griya Wreda-1311)

Tujuan : Meningkatkan kualitas kebutuhan dasar
Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari – Desember 2024
Pagu : Rp. 8.286.917.328,-
Manfaat : Adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di dalam UPTD yang berada dibawah Dinas Sosial Kota Surabaya.



Gambar : Kegiatan Senam Bersama dan Kegiatan Rohani di UPTD

6. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Tujuan : Meningkatkan kualitas kebutuhan dasar
Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari – Desember 2024
Pagu : Rp. 5.132.354.784,-
Manfaat : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya kelompok rentan melalui peningkatan pengetahuan dan kesehatan dasar yang dapat membantu masyarakat menjadi lebih mandiri dan sehat.



Gambar : Layanan Fisioterapi dan Pelatihan Menjahit di UPTD

7. Pemberian Layanan Rujukan

- Tujuan : Meningkatkan kualitas kebutuhan dasar
- Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari – Desember 2024
- Pagu : Rp. 640.392.326,-
- Manfaat : Mempermudah masyarakat rentan mendapatkan akses ke layanan lanjutan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.



Gambar : Pelayanan Rujukan bagi Penghuni UPTD

8. Pemberian Layanan Kedaruratan

- Tujuan : Memberikan jasa pelayanan mobil ambulance secara gratis, cepat dan tepat sesuai kebutuhan.
- Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari – Desember 2024
- Pagu : Rp. 2.820.881.361,-
- Manfaat : Adanya kesamaan peluang untuk

mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa pengantaran verobat dengan mobil ambulance gratis yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya.



Gambar : Kegiatan Pelayanan Kedaruratan Ambulance

9. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (Liponsos Keputih-1230)

Tujuan : Meningkatkan kualitas kebutuhan dasar

Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari – Desember 2024

Pagu : Rp. 2.820.881.361,-

Manfaat : Adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di dalam UPTD yang berada dibawah Dinas Sosial Kota Surabaya.



Gambar : Kegiatan Spiritual dan Olahraga Pagi

10. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan : Melakukan pendataan keluarga miskin yang terverifikasi dengan menggunakan variabel standar yang ditentukan.

Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari – Desember 2024

Pagu : Rp. 4.017.010.580,-

Manfaat : Adanya peningkatan peran perempuan dalam pendataan keluarga miskin.



Gambar : Survey Pendataan Keluarga Miskin

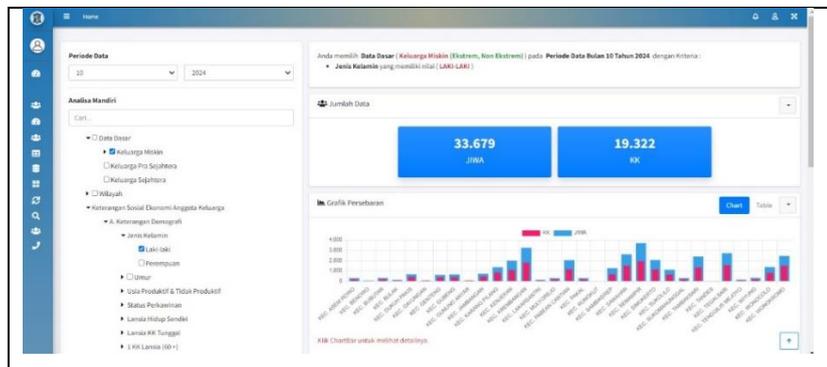
11. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

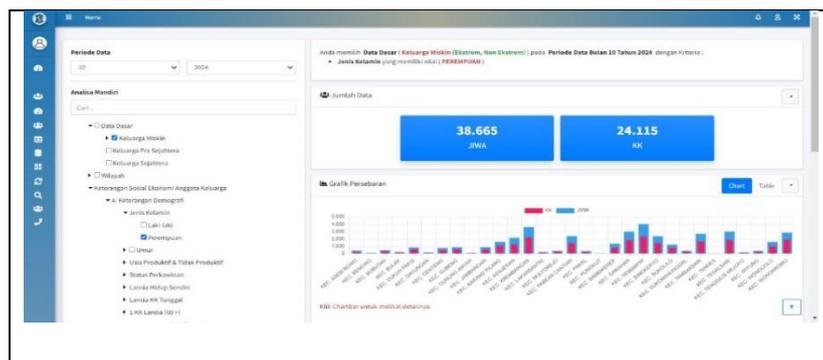
Tujuan : Mendapatkan jumlah data keluarga yang mendapatkan pengentasan kemiskinan.

Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari – Desember 2024

Pagu : Rp. 576.918.171,-

Manfaat : Mendapatkan jumlah data keluarga yang mendapatkan pengentasan kemiskinan yang responsif gender.





Gambar : Data Keluarga Miskin Laki-laki dan Perempuan

12. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Tujuan : Memberikan bantuan sosial kesejahteraan keluarga bagi keluarga penerima manfaat.

Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari – Desember 2024

Pagu : Rp. 48.074.447.125,-

Manfaat : Adanya kesamaan peluang laki-laki dan perempuan bisa menjadi petugas pendamping PKH, dan penerima manfaat kegiatan lebih responsif gender.



Gambar : Proses penyaluran bantuan sosial

13. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Tujuan : Memberikan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari – Desember 2024

Pagu : Rp. 7.928.410.824,-

Manfaat : Mendorong kemandirian ekonomi masyarakat rentan melalui pemberian bantuan dan pelatihan, sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup.



Gambar : Kegiatan penyaluran bantuan modal usaha

14. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota

Tujuan : Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional di Kota Surabaya

Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari – Desember 2024

Pagu : Rp. 1.756.987.458,-

Manfaat : Adanya peralatan penerima manfaat serta bertambahnya pemahaman akan isu gender dalam kegiatan ini.



Gambar : Pemeliharaan Taman dan Perbaikan Fasilitas TMP

Adapun dokumen terdapat pada link berikut : [DOKUMEN GAP, GBS, TOR PPRG 2024](#)

3.2 Pelaksanaan (Penjelasan sudah ada pada Juknis sblmnya)

- a. Output yang mendukung pemberdayaan Perempuan (Politik, Ekonomi, Sosial termasuk Hukum dan lainnya):

Tabel 6

Output Pendukung Pemberdayaan Perempuan

| No. | Bidang | Kegiatan |
|-----|---------|--|
| 1. | Politik | Pelatihan kepemimpinan perempuan di tingkat masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan lokal. Melalui pelatihan kepemimpinan, diharapkan lebih banyak perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas atau kelurahan, sehingga aspirasi mereka bisa lebih terakomodir. |
| 2. | Ekonomi | Program-program seperti pelatihan keterampilan wirausaha dan pemberian modal usaha bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan, terutama yang berasal dari kelompok rentan atau kurang mampu, sehingga mereka mampu berperan sebagai pilar ekonomi keluarga. |
| 3. | Sosial | Layanan sosial yang memberikan penyuluhan kesehatan dan dukungan kepada perempuan korban kekerasan akan meningkatkan kesejahteraan sosial mereka, serta memberi perlindungan bagi yang membutuhkan. |
| 4. | Hukum | Sosialisasi tentang hak-hak perempuan di bidang hukum, terutama dalam hal kekerasan dalam rumah tangga dan ketenagakerjaan, bertujuan untuk meningkatkan akses |

| | | |
|----|-------------------------|---|
| | | perempuan terhadap keadilan serta perlindungan hukum yang setara. |
| 5. | Lainnya (Budaya) | Pelibatan perempuan dalam pelestarian budaya, seperti seni kerajinan tangan, bertujuan untuk memajukan peran perempuan sebagai penjaga warisan budaya lokal, sekaligus sebagai sarana pemberdayaan ekonomi melalui penjualan hasil kerajinan. |
| 6. | Lainnya (Lingkungan) | Edukasi perempuan tentang pengelolaan lingkungan dan ketahanan pangan akan mendukung peran aktif mereka dalam menjaga kelestarian alam dan menciptakan komunitas yang lebih hijau serta berkelanjutan. |

b. Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

Ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan di Dinas Sosial Kota Surabaya berperan penting dalam mendukung upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan di kota tersebut. Lembaga-lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui berbagai program yang mencakup akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta mengatasi diskriminasi dan kekerasan. Berikut adalah lembaga utama dan pekerja sosial perorangan yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Kota Surabaya dan berfokus pada pemberdayaan perempuan:

1. Dharma Wanita Dinas Sosial Kota Surabaya

- Fungsi: Dharma Wanita berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas perempuan melalui program-program pemberdayaan.

Lembaga ini secara rutin menyelenggarakan:

- ✓ Pelatihan keterampilan: Dharma Wanita memberikan berbagai pelatihan keterampilan, seperti menjahit, memasak, dan kerajinan tangan, yang bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan ekonomi perempuan, terutama di kalangan ibu rumah tangga.

- ✓ Penyuluhan tentang hak-hak perempuan: Lembaga ini juga mengadakan kegiatan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan kesadaran perempuan akan hak-hak mereka, baik di bidang hukum, kesehatan, maupun ketenagakerjaan.\
- ✓ Dukungan untuk usaha mikro: Dharma Wanita memberikan bantuan serta bimbingan bagi perempuan yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro, dengan harapan mereka bisa lebih mandiri secara ekonomi.

2. WPKS (Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial)

- Fungsi: WPKS merupakan individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya. Mereka berperan sebagai penggerak, motivator, dan fasilitator dalam berbagai kegiatan sosial. Peran utamanya adalah:
 - ✓ Penggerak kesejahteraan sosial: WPKS membantu merancang dan melaksanakan program-program sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga. Mereka bekerja langsung dengan komunitas untuk mengidentifikasi kebutuhan lokal dan merancang solusi yang relevan.
 - ✓ Motivator komunitas: WPKS juga berfungsi sebagai motivator dalam lingkungan tempat mereka bekerja, mendorong partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi, termasuk dalam penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya.

Dengan adanya lembaga-lembaga ini, Dinas Sosial Kota Surabaya berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan ramah gender, serta memberikan perlindungan kepada perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan.

c. Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan di Internal PD dan Jejaring

Langkah yang diambil untuk mencegah atau mengurangi kekerasan terhadap perempuan melibatkan pembentukan Dharma Wanita Persatuan Dinas Sosial Kota Surabaya. Organisasi ini secara aktif memberikan edukasi dan penyuluhan tentang hak-hak perempuan, serta mengadakan pelatihan keterampilan guna meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan. Selain itu, mereka juga bekerja sama dalam penerapan sistem pemantauan untuk menilai sejauh mana program-program yang dijalankan berhasil, serta melakukan penyesuaian atau perbaikan sesuai kebutuhan.

d. Ketersediaan layanan bagi Perempuan dan anak di Internal PD dan Jejaring

Layanan yang disediakan bagi perempuan dan anak di Dinas Sosial Kota Surabaya diwujudkan melalui fasilitas umum yang dirancang agar ramah bagi mereka, namun tetap dapat diakses oleh semua, termasuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Misalnya, tersedia pembagian toilet yang ramah disabilitas, khusus untuk laki-laki, dan perempuan. Selain itu, ada juga fasilitas seperti pojok bermain untuk anak-anak disamping ruang tunggu pelayanan dan juga ruang laktasi yang bisa digunakan oleh ibu menyusui. Langkah-langkah ini menunjukkan perhatian luar biasa terhadap kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Surabaya, khususnya pada Dinas Sosial Kota Surabaya.

e. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender

Peningkatan kualitas keluarga dalam rangka mencapai Kesetaraan Gender di Dinas Sosial Kota Surabaya dilakukan melalui kegiatan pelatihan Dharma Wanita. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan yang berguna secara pribadi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Contohnya, pelatihan yang disediakan mencakup pelatihan memasak, pelatihan MUA, dan lain-lain.

f. Ketersediaan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas keluarga

Salah satu langkah yang diambil untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga adalah dengan mendirikan Dharma Wanita Persatuan di Dinas Sosial Kota Surabaya. Organisasi ini berfungsi sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi, kreativitas, dan kemandirian, dengan harapan dapat memberikan dampak positif dalam masyarakat. Selain itu, ada juga Pekerja Sosial (Peksos), termasuk Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), yang bertugas untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui advokasi dan pendampingan sosial. Mereka beroperasi di tingkat komunitas, memberikan dukungan kepada keluarga-keluarga yang memerlukan bantuan dalam menghadapi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, disabilitas, dan kekerasan dalam rumah tangga.

g. Ketersediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender

Dinas Sosial Kota Surabaya melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi, seperti program deteksi dini kekerasan pada anak, pemantauan perkembangan anak, pelatihan fisioterapi untuk Bunda PAUD dan PSM, serta penjelasan mengenai peran RAP dalam mendukung pengembangan bakat anak berkebutuhan khusus. Selain itu, ada juga sosialisasi untuk memberdayakan wanita ojek online, yang dilengkapi dengan bantuan modal dan bimbingan teknis, termasuk pelatihan menjahit.

Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu penting yang berkaitan dengan kesejahteraan anak dan perempuan. Dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang tepat, program ini mendukung kesetaraan gender dengan memberikan perempuan akses terhadap informasi, pelatihan, dan peluang ekonomi, serta melindungi hak-hak anak. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan mendukung bagi semua anggota keluarga.

h. Program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender

Salah satu program pembangunan berbasis kewilayahan Dinas Sosial Kota Surabaya yang mengintegrasikan perspektif gender, antara lain :

- a) Sistem pelayanan prima yang ramah perempuan dan anak berbasis digitalisasi, seperti aplikasi <https://sikeluargamiskin.surabaya.go.id/> yang dirancang untuk memastikan akses yang setara bagi semua kalangan, memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan informasi dan layanan yang dibutuhkan.
 - b) Merancang fasilitas publik yang mempertimbangkan kebutuhan perempuan, seperti ruang aman bagi ibu dan anak, serta aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Seperti ruang laktasi, ruang bermain anak, loket khusus dan guiding blocks bagi disabilitas.
 - c) Menyediakan pendampingan sosial yang mempertimbangkan dinamika gender dalam keluarga, untuk mengatasi masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga PSKS.
 - d) Mengadakan pelatihan keterampilan dan akses modal untuk perempuan di tingkat komunitas, seperti pelatihan terhadap wanita ojek online dan pemberian bantuan modal usaha.
- i. Data angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Internal Dinas Sosial**

Menurut informasi yang tersedia, saat ini tidak ada kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat di Dinas Sosial Kota Surabaya. Situasi ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Surabaya yang sangat memperhatikan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak.

j. Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender

Ketersediaan sarana dan prasarana yang peka terhadap isu gender menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, dapat mengakses fasilitas yang aman dan nyaman sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Sarana dan prasarana tersebut antara lain :

Tabel 7
Sarana dan Prasarana Responsif Gender

| No. | Jenis | Ada/Tidak | Bukti Dukung |
|-----|---|-----------|---|
| 1 | Toilet Laki-laki, Perempuan dan Disabilitas | Ada | Toilet |
| 2 | Sarana Prasarana Kelompok rentan | Ada | Sarpras Kelompok Rentan |

k. Pembinaan PUG Perangkat Daerah kepada Internal PD dan jejaring

Pembinaan Pengarusutamaan Gender di Dinas Sosial Kota Surabaya diimplementasikan dalam bentuk penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam bentuk GAP, GBS dan TOR.

3.3 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Nomor: 100.3.3/06.1/436.7.6/2024 Tahun 2024 adalah sebuah kebijakan yang mengatur pembentukan Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) di Dinas Sosial Kota Surabaya untuk tahun 2024. Namun, karena terjadi perubahan anggota dalam tim tersebut, diterbitkanlah perubahan SK dengan Nomor: 100.3.3/13.1/436.7.6/2024 Tahun 2024 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 100.3.3/06.1/436.7.6/2024 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2024.

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi PPRG 2024 dan PPRG 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan pokok bahasan antara lain :

- a. Sosialisasi Hasil dari Bimbingan Teknis PPRG 2025 bahwa GBS dan TOR digabung menjadi satu dan berubah menjadi Gender Action Budget (GAB);
 - b. Pendampingan dan Reviu Penyusunan GAP, GBS, dan TOR Tahun 2024;
- Adapun dokumen pendukung terdapat pada link berikut : [Monev PPRG](#)

3.4 Pengawasan

Pengawasan terhadap implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Sosial tidak hanya melibatkan unsur-unsur dari dalam organisasi, tetapi juga melibatkan pihak-pihak eksternal. Proses ini mencakup kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Anggaran dan Pemerintah Daerah (TAPD), serta pendampingan dari Inspektorat. Semua kegiatan ini bertujuan untuk memastikan adanya pengawasan yang efektif terhadap penerapan Pengarusutamaan Gender.

3.5 Pelaporan

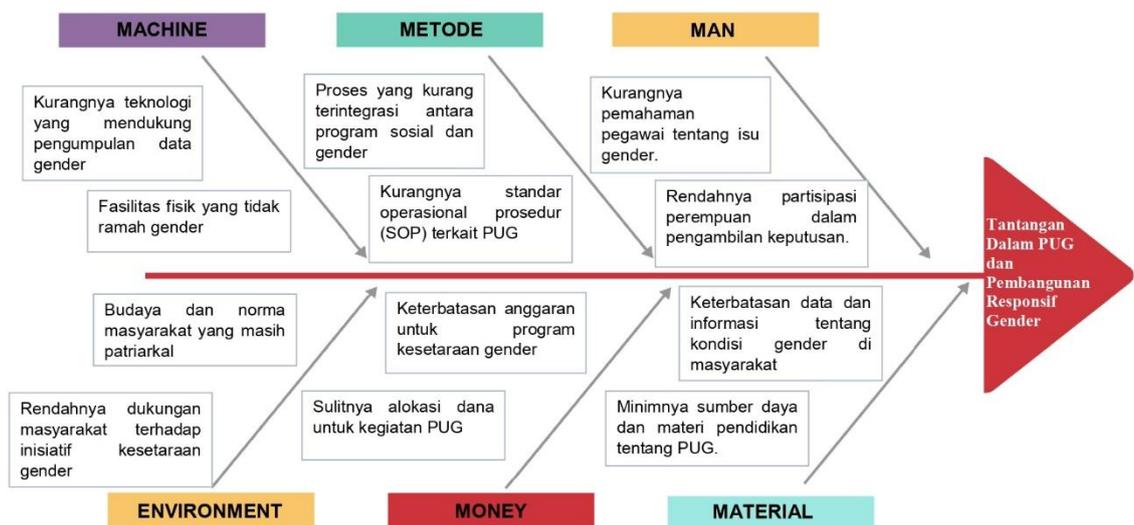
Pelaporan Pengarusutamaan Gender berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Nomor: 100.3.3/06.1/436.7.6/2024 Tahun 2024 adalah suatu kebijakan yang mengatur pembentukan Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) di Dinas Sosial Kota Surabaya untuk tahun 2024. Namun, akibat adanya perubahan anggota tim, diterbitkanlah SK baru dengan Nomor: 100.3.3/13.1/436.7.6/2024 yang mengubah SK sebelumnya, yaitu Nomor: 100.3.3/06.1/436.7.6/2024, terkait Tim Focal Point PUG. Implementasi pelaporan Pengarusutamaan Gender dilakukan melalui Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, yang mencakup analisis kesenjangan gender (GAP), gender budgeting statement (GBS), dan term of reference (TOR) serta Profil Gender Dinas Sosial Kota Surabaya.

BAB IV
TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER
KOTA SURABAYA

4.1 Analisa (Fish Bone, Man, Material, Metode dsb)

Berikut adalah tabel analisis Fishbone untuk tantangan atau permasalahan Dinas Sosial dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pembangunan responsif gender di Kota Surabaya.

Tabel 7
Fishbone Diagram



4.2 Kesimpulan

1. Diperlukan lebih banyak pelatihan dan peningkatan pemahaman tentang isu gender bagi pegawai Dinas Sosial, agar kemampuan mereka dalam menerapkan perspektif gender dalam pengelolaan keuangan dapat meningkat.
2. Penting untuk memberikan dukungan yang konsisten terhadap kebijakan yang mendukung Pengarusutamaan Gender, karena kebijakan yang saat ini ada mungkin belum sepenuhnya mencakup aspek-aspek penting terkait gender.

3. Perlu ada penganggaran yang ditujukan untuk program-program yang berfokus pada gender dan pengembangan yang responsif gender, sehingga pelaksanaan program dapat dilakukan dengan lebih efektif.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu gender sangat penting, karena hal ini akan berdampak positif pada keberhasilan pelaksanaan program-program yang ada.
5. Diperlukan peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk melacak dan menilai dampak dari program-program Pengarusutamaan Gender, agar proses perbaikan yang berkelanjutan tidak terhambat.
6. Perlu meningkatkan koordinasi antara Dinas Sosial dan lembaga pemerintah lainnya dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan gender untuk memastikan sinergi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.

4.3 Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/Saran

Kegiatan yang telah dilakukan Dinas Sosial sebagai berikut:

- a. Menyediakan Kesempatan yang Setara untuk Pelamar
Dinas Sosial memberikan kesempatan yang sama kepada pelamar, baik pria maupun wanita, dalam proses perekrutan.
- b. Menyediakan Program Bimbingan yang Setara
Dinas Sosial menawarkan program bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang setara kepada semua penghuni panti asuhan.
- c. Membuka Peluang untuk Pekerja Perempuan
Dinas Sosial memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mendaftar sebagai Tenaga Operasional di lembaga tersebut.
- d. Memberikan Layanan yang Adil kepada Masyarakat
Dinas Sosial memberikan layanan yang sama kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan, tanpa membedakan jenis kelamin.

Rekomendasi/Saran :

1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan
Secara rutin, Dinas Sosial menyelenggarakan pelatihan mengenai perspektif gender untuk seluruh pegawai, serta berkolaborasi dengan

organisasi masyarakat sipil.

2. Komitmen Anggaran yang Berkelanjutan

Menjamin adanya alokasi anggaran yang sesuai untuk program-program terkait gender, dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan anggaran tersebut.

3. Pengembangan Jaringan Sosialisasi

Membangun dan memperluas jaringan sosialisasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat, sektor swasta, dan komunitas setempat.

4. Dialog dan Forum Komunikasi

Menyelenggarakan dialog dan forum komunikasi secara teratur antara Dinas Sosial dan lembaga lainnya untuk mendiskusikan serta berbagi informasi tentang program Pengarusutamaan Gender.

5. Penyusunan Kebijakan yang Jelas

Mengembangkan kebijakan yang lebih tegas dan jelas dalam mengintegrasikan aspek gender ke dalam setiap kebijakan dan program yang ada.

6. Implementasi Sistem Monitoring yang Efektif

Menerapkan sistem pemantauan yang efektif dengan menyusun indikator yang jelas dan terukur untuk mengevaluasi dampak dari setiap program yang dijalankan, serta memanfaatkan data untuk perbaikan yang berkelanjutan.

BAB V

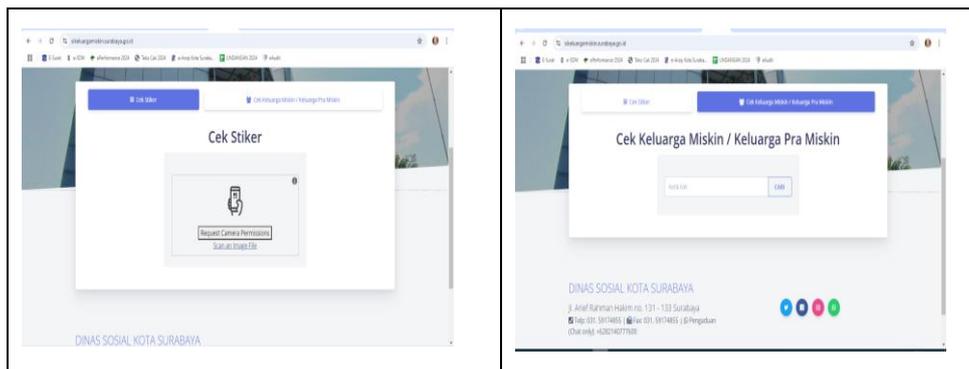
INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Surabaya yang berbasis Gender (GEDSI), Issue Gender Kota Surabaya antara lain:

a. Website Sigamis

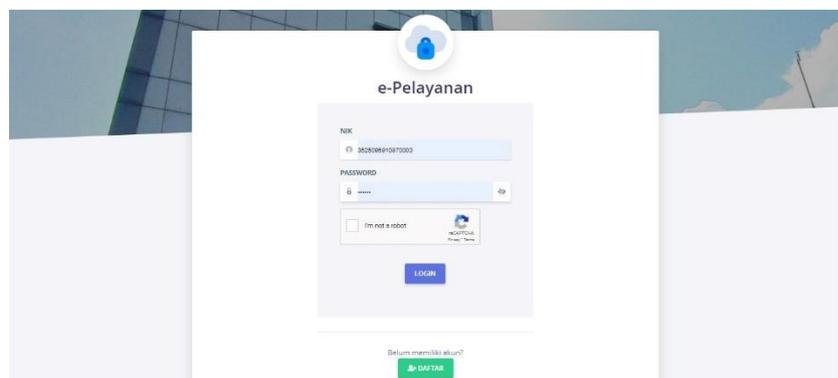
Sigamis adalah Sistem Informasi Keluarga Miskin yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pengecekan NIK. Sigamis dapat diakses melalui link <https://sikeluargamiskin.surabaya.go.id/>



b. E-Pelayanan

Aplikasi yang dapat digunakan oleh semua warga miskin untuk membuat atau mengajukan SKKM (Surat Keterangan Keluarga Miskin) Sebagai syarat-syarat pengurusan. E-Pelayanan dapat diakses pada link :

<https://dinassosial.surabaya.go.id/pelayanan>



c. Incip Kolak Kanri

INCIP KOLAK KANRI merupakan kepanjangan dari Inisiasi Menciptakan Kota Layak Anak di UPTD Kampung Anak Negeri, menggambarkan proses pendampingan, pembinaan, pelatihan serta pengarahan anak usia sekolah yang memiliki permasalahan yang kompleks dalam kehidupannya sehingga dalam keberlangsungannya mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kegiatan INCIP KOLAK KANRI dilakukan di UPTD Kampung Anak Negeri Dinas Sosial Pemerintah Kota Surabaya yang melibatkan instansi Pendidikan, Dinas Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Lintas Sektor lainnya. Kegiatan INCIP KOLAK KANRI memberikan banyak manfaat khususnya pada anak-anak yang awalnya mengalami putus sekolah ataupun tidak bersekolah sama sekali dan juga hidup di jalanan sehingga mendapatkan Pendidikan yang sesuai dengan usia yang dialami dan bahkan beberapa anak memperoleh prestasi yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya.



BAB VI

PENUTUP

Dengan demikian, penyusunan “Profil Perangkat Daerah Responsif Gender Bersinergi Dengan Daerah Ramah Perempuan Dan Peduli Anak” ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja serta Responsivitas Gender Perangkat Daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang Responsif Gender dan Sosial Inklusif serta lebih ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga profil PUG Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh Perangkat Daerah dan jejaringnya serta masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya yang Responsif Gender dan Sosial Inklusif sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak Tahun 2024.

LAMPIRAN

1. SK Focal Point PUG Dinas Sosial Kota Surabaya : [SK FOCAL POINT 2024](#)
2. Foto/Dokumentasi Kegiatan responsif gender Dinas Sosial
 - a. Program Pengentasan Kemiskinan
 - b. Program Pemberdayaan Wanita dan Bantuan kepada Rawan Sosial (Wanita Ojek Online)
 - c. Kegiatan Sosialisasi DDTK
 - d. Pertemuan WPKS
 - e. Wisata Sosial bagi Anak Sekolah
 - f. Kegiatan TAGANA Goes To School
 - g. Kegiatan Pengembangan Kapasitas TKSK

Adapun Bukti Dukung Kegiatan tersebut dapat dilihat pada link berikut ini :

[KEGIATAN RESPONSIF GENDER](#)

3. Bukti dukung inovasi penyelenggaraan PUG Dinas Sosial Kota Surabaya : [INOVASI DINAS SOSIAL](#)